

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERMINTAAN
KREDIT PADA BPR DI WILAYAH KERJA
KABUPATEN JEMBER

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi
Universitas Jember



No. Induk: 01 FEB 2005
Oleh: Sudarmono
332.7
PUS
f

Sudarmono
NIM:010810191557

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER

2005

JUDUL SKRIPSI

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

N a m a : SUDARMONO

N. I. M. : 010810191557

Jurusan : ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN

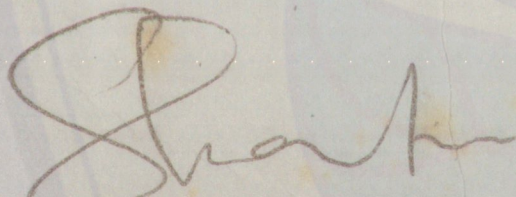
telah dipertahankan di depan Panitia Penguji pada tanggal :

28 DESEMBER 2004

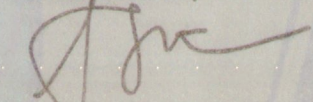
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh gelar **S a r j a n a** dalam Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

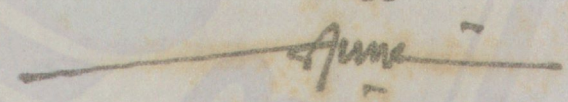
Susunan Panitia Penguji

Ketua,

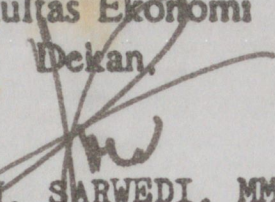

SISWOYO HARI S., SE, MSI
NIP. 132 056 182

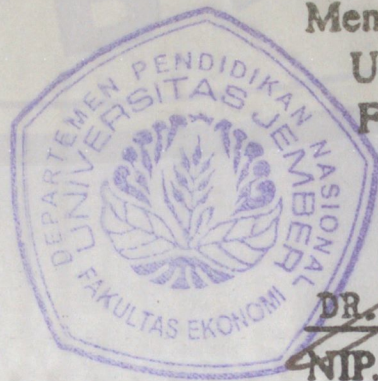
Sekretaris,


AISAH JUMIATI, SE
NIP. 132 086 408
Anggota,


Drs. BADJURI, NE
NIP. 131 386 652

Mengetahui/Menyetujui
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi
Dekan,


DR. H. SARWEDI, MM
NIP. 131 276 658



TANDA PERSETUJUAN

Nama : Sudarmono
Nim : 010810191557
Konsentrasi : Ekonomi Moneter
Judul : Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Kredit Pada BPR
Di Wilayah Kerja Kabupaten Jember

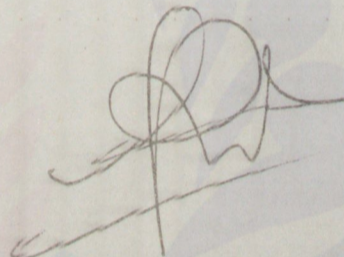
Pembimbing I



Drs. Badjuri, ME

NIP : 131386652

Pembimbing II

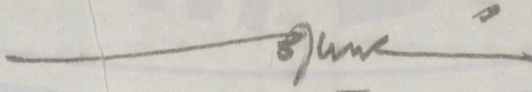


Dra. Riniati, MP

NIP : 131624477

Koordinator

Program Studi I E S P



Drs. Badjuri, ME

NIP : 131386652

MOTTO :

"Barang siapa di uji lalu bersabar, diberi lalu bersyukur, di dzalimi lalu memaafkan dan mendzalimi lalu beristigfar, maka bagi mereka keselamatan dan mereka tergolong orang-orang yang memperoleh hidayah".

HR. Al Baihaqi

"Tuntutlah ilmu, tapi tidak melupakan ibadah dan kerjakanlah ibadah tapi tidak boleh lupa pada ilmu".

HR. Hasan Al Bashri

**Sumber : Muhamnad Faiz Al Math, 1993. 1100 Hadist
Terpilih, Gema Insani Pers.**

Teriring do'a buat almarhum Ayahanda

M U L Y A D I, tercinta

Semoga mendapat Ampunan-**Nya**

Serta diterima disisi-**Nya**

KU PERSEMBAHKAN SKRIPSI INI KEPADA

- > Nusa & Bangsaku tercinta
- > Almamaterku yang tercinta
- > Ibunda **T I P Y A N I** tercinta
- > Kakak-kakaku tercinta

Mas Sumitro dan mbak Widi Astutik

- > Buat Fani tercinta
- > Teman-teman seperjuangan

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini walaupun dalam bentuk yang sederhana sekalipun sebagai persyaratan akademis untuk menyelesaikan kuliah pada program sarjana (S1 Ekstensi) jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak lain karena rahmat dan petunjuk dari Allah SWT disamping bimbingan, dorongan serta bantuan dari semua pihak yang selama ini telah rela dan senang hati memberikan uluran tangan kepada penulis.

Karena itu sudah sewajarnya bagi penulis untuk menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Drs. Badjuri, ME, selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Dra. Riniati, MP selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan serta saran-saran hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.
2. DR. Sarwedi, MM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
3. Bapak pimpinan Bank Perkreditan Rakyat dan staf yang telah membantu penulis dan memberikan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan penelitian sebagai bahan skripsi penulis.
4. Para Dosen dan Staf yang telah memberikan bekal ilmu sehingga melancarkan jalannya penulisan skripsi ini.
5. Rekan-rekan seperjuangan dalam studi yang telah banyak memberikan bantuan serta dorongan sehingga terselesainya penulisan skripsi ini.

Akhirnya kami menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, semoga dapat memberikan manfaat dan kepuasan sebagaimana yang diharapkan, oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun akan kami terima dengan tangan terbuka dan senang hati.

Jember, Oktober 2004

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Alasan Pemilihan Judul	1
1.2 Perumusan Masalah	4
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Penelitian	4
1.3.2 Kegunaan Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Penelitian Sebelumnya	5
2.2 Landasan Teori	6
2.2.1 Pengertian Bank	6
2.2.2 Tujuan Bank Umum	7
2.2.3 Tugas Pokok Bank Umum	7
2.2.4 Usaha Bank Umum	8
2.2.5 Pengertian Kredit	11
2.2.6 Kebijakan Per Kreditan	13
2.2.7 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Besarnya Permintaan Kredit BPR	14
2.2.7.1 Suku Bunga	14
2.2.7.2 Agunan (Jaminan Kredit)	16
2.2.7.3 Tingkat Pendapatan	18
2.2.8 Perkembangan BPR	20

2.2.9 Hipotesis	22
BAB III METODE PENELITIAN	23
3.1 Daerah Penelitian	23
3.2 Metode Pengambilan Sampel	24
3.3 Sumber Data	24
3.4 Metode Analisis Data	27
3.5 Definisi Operasional	27
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	28
4.1 Gambaran Umum	28
4.1.1 Sejarah	28
4.1.2 Peranan BPR dalam Rangka Kebijakan Pakto	32
4.1.3 Prospek BPR yang Berkaitan dengan Fungsinya	34
4.2 Pembahasan	35
4.2.1 Pengaruh Agunan, Tingkat Bunga dan Tingkat Pendapatan terhadap Permintaan Kredit	35
4.2.2 Pengujian Tahap Keberartian Koefisien Regresi pada Permintaan Kredit	36
4.2.2.1 Uji Koefisien Regresi Serentak/Bersama	36
4.2.2.2 Uji Koefisien Regresi Secara Parsial	37
4.2.3 Koefisien Korelasi Parsial dan Koefisien Determinasi Variabel Agunan, Tingkat Bunga dan Tingkat Pendapatan Terhadap Variabel Permintaan Kredit	39
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	41
5.1 Kesimpulan	41
5.2 Saran	42
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul Tabel	Halaman
1.	Perkembangan Usaha BPR	21
2.	Jumlah Sampel BPR	23
3.	Analisis Varian Empat Variabel	27
4.	Pengujian Koefisien Regresi Secara Bersama-sama	37
5.	Statistik Uji t Terhadap Koefisien Regresi Agunan, Tingkat Bunga dan Tingkat Pendapatan	37

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Judul Tabel
1.	Data Faktor-faktor yang Mempengaruhi Permintaan Kredit
2.	Perhitungan Analisis Regresi
3.	Matrik Korelasi
4.	Kriteria Pengujian Agunan dengan Menggunakan Uji Signifikan Dua Arah t-Test Memakai Level of Significan 95%
5.	Kriteria Pengujian Tingkat Bunga dengan Menggunakan Uji Signifikan Dua Arah t-Test Memakai Level of Significan 95%
6.	Kriteria Pengujian Tingkat Pendapatan dengan Menggunakan Uji Signifikan Dua Arah t-Test Memakai Level of Significan 95%



BAB I PENDAHULUAN



1.1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan pada hakekatnya adalah proses perubahan yang terus-menerus untuk menciptakan tingkat kemakmuran yang lebih baik. Kebijakan pembangunan ekonomi merupakan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Pembangunan ekonomi merupakan bagian dari pembangunan nasional untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam pelita kelima, arah dan kebijaksanaan pembangunan yang ditempuh adalah melanjutkan hasil yang telah dicapai pada pelita keempat, bahkan harus terus ditingkatkan agar makin dapat dirasakan perbaikan taraf hidup dan kecerdasan rakyat yang mencerminkan meningkatnya kualitas manusia maupun masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan yang makin merata dan adil bagi seluruh rakyat. Pembangunan nasional disegala bidang harus selalu diarahkan untuk makin memantapkan perwujudan wawasan nusantara dan memperkuat ketahanan nasional. Untuk memantapkan stabilitas nasional dalam bidang ekonomi maka kebijaksanaan ekonomi guna mendukung laju pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Dalam rangka pencapaian tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi sebesar 5% per tahun, diperkirakan diperlukan dana investasi sebesar Rp. 239,1 triliun. Dari jumlah tersebut, lebih dari setengahnya diharapkan berasal dari dan dilaksanakan oleh dunia usaha serta masyarakat sendiri. Dalam rangka itu perlu ditingkatkan produksi barang dan jasa diberbagai sektor ekonomi, dengan dukungan serta partisipasi aktif dan luas dari masyarakat, seperti pertanian, pariwisata, pertambangan dan energi, perhubungan, perdagangan, pemanfaatan sekaligus kelestarian sumber daya alam dan lingkungan dan sebagainya serta peningkatan pengerahan sumber

daya dan dana, pembangunan pranata pendukung, pengembangan serta pemanfaatan perluasan kesempatan berusaha dan (dengan menghindarkan bentuk monopoli yang merugikan masyarakat (GBIHN, 1988:438).

Kebijaksanaan perkreditan dan perbankan sebagai komponen kebijaksanaan moneter merupakan alat atau sarana untuk menunjang program ekonomi dan pembangunan disegala bidang. Dengan adanya sarana perkreditan tersebut produksi dapat ditingkatkan dan sekaligus akan menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini terbukti dengan perhatian pemerintah terhadap sektor perbankan, yaitu dengan kebijaksanaan 27 Oktober 1988 (Pakto 27) dengan maksud untuk membangkitkan dinamika baru dibidang perbankan. Kebijakan ini membawa dampak yang positif terhadap dinamika usaha perbankan baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Dari segi kuantitas terjadi penambahan jumlah bank dan peningkatan kredit perbankan serta jumlah dana yang berhasil dihimpun.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagai perbaikan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan disebutkan bahwa bank menurut fungsinya dapat dibedakan menjadi Bank umum dan Bank Sentral. Bank umum adalah bank yang dapat memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran seperti menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, memberikan kredit, menerbitkan surat pengakuan hutang (promes), membeli dan menjual surat berharga (efek), sedangkan Bank Sentral adalah Bank yang mencetak dan mengedarkan uang kepada masyarakat dan sebagai penguasa moneter.

Dengan adanya kebijaksanaan moneter dan perbankan semacam ini, maka persaingan antar bank umum menjadi lebih tajam, oleh karena itu diharapkan bank-bank tersebut dapat meningkatkan kualitas pelayanannya.

• Dalam perkembangannya, berdasarkan keputusan presiden RI Nomor 38 Tahun 1988 lahir pula Bank Perkreditan Rakyat sebagai sebuah lembaga keuangan yang bergerak dibidang perkreditan rakyat. Dengan

dibukanya Bank Perkreditan Rakyat diharapkan dapat menunjang roda kegiatan usaha ekonomi, baik dibidang produksi, maupun distribusi atau pemasaran. Kehadiran BPR diharapkan dapat menghindarkan praktek pemerasan dari para pelepas uang terhadap pengusaha golongan ekonomi lemah. Bank Perkreditan Rakyat turut pula berperan dalam menampung dan menghimpun tabungan masyarakat, karena adanya kegiatan pembangunan di daerah-daerah. Dengan demikian Bank Perkreditan Rakyat dapat turut memobilisasi modal untuk keperluan pembangunan, dan turut mendidik rakyat dalam menghemat dan menabung dengan menyediakan tempat yang dekat, aman dan mudah untuk menyimpan uang bagi penabung kecil selain dari pada itu usaha Bank Perkreditan Rakyat juga memberikan kredit bagi nasabahnya. Pengambilan kredit pada BPR relatif sangat mudah dan cepat, pengaruh tingkat bunga, tingkat pendapatan dan agunan (jaminan kredit) sangat berpengaruh terhadap jumlah kredit yang diterima oleh nasabahnya atau masyarakat.

Dengan beradanya Bank Perkreditan Rakyat di tengah-tengah masyarakat di desa-desa, di kampung-kampung dan di pasar-pasar untuk memberikan bantuan atau pelayanan perbankan dari bank umum, maka Bank Perkreditan Rakyat mendekati bank kepada masyarakat dan mengantarkan jasa-jasa perbankan sampai kelapisan terendah dari masyarakat Indonesia, baik di kota-kota maupun di daerah pedesaan.

Mengapa seseorang memerlukan kredit?, manusia adalah homo economicus dan setiap manusia selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan manusia yang berbeda dan beraneka ragam sesuai dengan harkatnya yang selalu meningkat, sedangkan kemampuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan adalah terbatas. Hal ini menyebabkan perlunya bantuan untuk memenuhi hasrat dan cita-citanya. Manusia memerlukan bantuan dalam bentuk barang, bantuan dari bank dalam bentuk permodalan inilah yang disebut kredit.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang timbul adalah “ Faktor-faktor apa yang mempengaruhi permintaan kredit pada BPR di wilayah kerja Kabupaten Jember “?.

1.3. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh agunan, tingkat bunga, dan pendapatan secara bersama terhadap besarnya kredit yang diminta.
2. Untuk mengetahui pengaruh agunan terhadap besarnya kredit yang diminta.
3. Untuk mengetahui pengaruh tingkat bunga terhadap besarnya kredit yang diminta.
4. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendapatan terhadap besarnya kredit yang diminta.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

1. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti lain dalam permasalahan yang sama untuk lingkup waktu dan wilayah yang berlainan.
2. Sebagai informasi bagi lembaga yang berkaitan dalam menentukan kebijaksanaannya pada masa yang akan datang.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Penelitian Sebelumnya

Penelitian mengenai faktor yang mempengaruhi permintaan kredit pada BPR telah banyak diteliti oleh para peneliti sebelumnya, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Ninik Siswati pada tahun 1999 dengan Judul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Kredit Pada BPR Di Wilayah Kerja Kabupaten Blitar dengan kesimpulan atau hasil penelitian sebagai berikut :

1. Pengaruh secara bersama antara tingkat bunga, agunan dan tingkat pendapatan terhadap permintaan kredit diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 0,7199 atau 71,99%, artinya sumbangan variabel-variabel agunan, tingkat bunga dan tingkat pendapatan terhadap naik turunnya permintaan kredit sebesar 71,99% sedangkan sisanya 28,01% disebabkan oleh faktor lain.
2. Dari hasil pengujian terhadap koefisien regresi agunan mempunyai pengaruh signifikan terhadap permintaan kredit. Hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan bahwa t hitung sama dengan 3,903 > t tabel sama dengan 1,674.
3. Dari hasil pengujian terhadap koefisien regresi ternyata tingkat bunga kurang berpengaruh terhadap permintaan kredit. Hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan bahwa t hitung 0,636 < t tabel 1,674.
4. Berdasarkan dari hasil pengujian terhadap koefisien regresi tingkat pendapatan mempunyai pengaruh positif terhadap permintaan kredit. Hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan bahwa t hitung 10,189 > t tabel 1,674.

5. Berdasarkan dari hasil analisis ternyata permintaan kredit tanpa adanya faktor agunan, tingkat bunga dan tingkat pendapatan nilainya sebesar 6.337.0560.

Dengan demikian faktor-faktor seperti agunan, tingkat bunga dan tingkat pendapatan secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap permintaan kredit pada BPR. Penelitian ini pada dasarnya hampir sama dengan penelitian-penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya hanya saja lokasi dan waktu yang beda.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Pengertian Bank

Dalam membahas suatu permasalahan yang berkaitan dengan perbankan, maka perlu untuk dibahas terlebih dahulu pengertian dari bank itu sendiri. Menurut G.M Verrijn Stuart, bank merupakan suatu lembaga yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat bukan milik sendiri ataupun dengan jalan mengedarkan alat tukar dalam bentuk uang (Winardi, 1980:9). Adapun yang dimaksud dengan alat bukan milik sendiri terdiri dari uang yang diserahkan pihak ketiga kepada bank-bank dan atau diciptakan oleh bank (Winardi, 1980:10).

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan dijelaskan bahwa bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Lembaga keuangan adalah semua badan yang melakukan kegiatan-kegiatan dibidang keuangan, menarik uang dari dan menyalurkan ke dalam masyarakat (Soetatwo Hadiwigeno ; Farid Wijaya, 1984:474).

Pengertian tersebut di atas masih luas, sedangkan dalam masalah ini yang dibahas adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang merupakan salah satu dari bank umum milik swasta. Bank umum menurut Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 1967 adalah bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito, dan dalam usahanya berusaha memberikan kredit jangka pendek. Kredit jangka adalah kredit dari bank yang batas pengembaliannya maksimum 1 (satu) tahun. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa bank adalah lembaga keuangan yang memberikan kredit, utamanya kredit jangka pendek dan memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

2.2.2. Tujuan Bank Umum

Bank-bank pada umumnya bekerja berdasarkan mencari keuntungan, yang tentu saja berkepentingan dengan hasil yang akan diperoleh dari investasi modal. Para pelanggan bank atau nasabah juga berkepentingan untuk mendapatkan pelayanan jasa-jasa bank yang layak dari bank sesuai dengan yang dibutuhkan. Dari sini bisa dilihat bahwa bank mempunyai tujuan ganda dilihat dari sudut investor dan dari sudut nasabah, Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang membina dan mengawasi bank umum harus ikut serta mendorong bank umum agar dapat bertahan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Bank merupakan sebuah lembaga yang berusaha untuk menerima kewajiban-kewajiban finansial agar dengan demikian dapat memperluas pemberian kredit, dan selanjutnya dapat meningkatkan keuntungan. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan dari bank umum adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dan sekaligus mencari keuntungan demi kelangsungan usaha bank.

2.2.3. Tugas Pokok Bank Umum

Tugas pokok perbankan dibawah bimbingan serta pembinaan dari Bank Indonesia sebagai bank sentral adalah untuk menghimpun segala dana dari masyarakat untuk diarahkan dalam sektor-sektor yang produktif dan

selanjutnya ditujukan untuk mempertinggi taraf hidup masyarakat. Pengaturan kembali tata perbankan di Indonesia seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan, dimaksudkan sebagai pembinaan sistem ekonomi nasional yang berlandaskan Pancasila yang menjamin berlangsungnya demokrasi ekonomi dan bertujuan menciptakan masyarakat adil makmur. Untuk mencapai maksud tersebut maka segala potensi, inisiatif dan daya kreasi wajib dimobilisasi dan dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan masyarakat luas. Dengan demikian, segala kekuatan ekonomi potensial dapat dikerahkan menjadi kekuatan ekonomi riil bagi kemakmuran masyarakat luas.

Dari kondisi tersebut diatas dan dengan berdasarkan pada Undang-Undang Perbankan maka tugas pokok dari bank umum adalah memberikan kredit bagi sektor-sektor yang produktif dengan dana yang dihimpun dari masyarakat, serta memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

2.2.4. Usaha Bank Umum

Sehubungan dengan tugas pokok perbankan di dalam undang-undang tentang pokok-pokok perbankan, maka usaha dari bank umum meliputi :

1. Memindahkan uang, baik melalui pemberitahuan telegram, dengan surat, dengan jalan memberikan wesel tunjuk diantara sesama kantornya.
2. Menerima dan membayarkan kembali uang dalam rekening koran, menjalankan perintah untuk memindahkan uang, menerima pembayaran dari tagihan-tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.
3. Mendiskonto surat wesel, kertas perbendaharaan atas beban negara, dan jenis-jenis surat berharga lainnya.

4. Memberikan kredit, dengan tanggungan efek, hasil bumi, barang dan juga tanggungan dokumen pengakuan dan dokumen penyimpanan yang mewakili barang tersebut serta memberi kredit jangka menengah dan panjang untuk tujuan bidang produksi sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.
5. Memberikan jaminan bank (bank guarantee) dengan tanggungan yang cukup.
6. Menjalankan usaha-usaha yang lazim dilakukan oleh bank umum (Thomas Suyanto, dkk, 1987:8).

Berdasarkan tugas pokoknya maka dalam operasionalnya bank umum dapat melakukan tugas-tugas sebagai berikut :

1. Memberi kredit
2. Menerima simpanan giro
3. Menerima simpanan deposito
4. Menerima simpanan tabungan
5. Melayani permintaan pinjaman uang
6. Melayani permintaan pembayaran hutang
7. Melayani permintaan penagihan piutang
8. Melayani permintaan penyimpanan barang-barang yang berharga atau bernilai tinggi.
9. Melakukan perdagangan wesel dan efek
10. Melakukan perdagangan valuta asing (valas).

(Slamet Hadisoewito, 1987:10) menyebutkan beberapa lapangan usaha yang dapat dilakukan oleh bank umum adalah :

1. Menerima simpanan dari masyarakat dalam bentuk-bentuk sebagai berikut:
 - a. Giro : Simpanan dari pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, surat perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan.

- b. Deposito : Simpanan dari pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam suatu jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara pihak ketiga dengan bank.
 - c. Tabungan : Simpanan dari pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu.
2. Memberikan kredit jangka pendek, yang hanya bisa diberikan dengan jaminan tertentu. Yang dimaksud dengan kredit jangka pendek adalah kredit yang jangka waktunya 1 (satu) tahun atau kurang.
 3. Memberikan kredit jangka menengah dan panjang kepada sektor industri. Dalam hal ini pemberian kredit jangka menengah dan panjang ini dalam undang-undang pokok perbankan ditetapkan suatu ketentuan bahwa bank umum di Indonesia yang melakukan usaha ini harus terlebih dahulu meminta persetujuan usaha Bank Sentral dalam hal ini Bank Indonesia. Adapun yang dimaksud dengan kredit jangka menengah adalah kredit yang berjangka waktu lebih dari satu tahun dan kurang atau sampai dengan tiga tahun, sedangkan kredit jangka panjang adalah kredit dengan jangka waktu lebih dari tiga tahun.
 4. Memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran transfer antar daerah, inkaso yaitu melakukan jasa penagihan atas surat-surat berharga tertentu serta transfer lainnya.
 5. Mendiskontokan dan memperdagangkan efek-efek kertas perbendaharaan negara dan surat-surat berharga lainnya.
 6. Memberikan bank garansi
 7. Melakukan perdagangan valuta asing
 8. Melakukan transaksi bayar-membayar dalam hubungannya dengan ekspor, impor dan jasa-jasa devisa.
 9. Melayani penyimpanan surat berharga

Berdasarkan pada usaha tersebut, maka bank dapat dikatakan mempunyai fungsi :

1. Pengumpulan dana
2. Memperlancar pembayaran
3. Menjamin keamanan
4. Penciptaan kredit

2.2.5. Pengertian Kredit

Seperti telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, salah satu fungsi bank umum adalah sebagai pengumpul dana, selain fungsi yang lain yaitu memperlancar pembayaran, menjamin keamanan dan pencipta kredit. Dalam kaitannya fungsi bank umum sebagai pemberi kredit maka bank umum dituntut untuk lebih berhati-hati dalam pemberian kreditnya, agar kredit yang diberikan tersebut dapat dikembalikan oleh debitur tepat pada saat kredit tersebut jatuh tempo.

Kata kredit berasal dari bahasa latin "Creditum" yang berarti kepercayaan akan kebenaran. Sedangkan pengertian kredit seperti yang telah dirumuskan pada bab 1 pasal 1 dan 2 Undang-Undang Pokok Perbankan No. 14 Tahun 1967 disebutkan :

"Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan lain pihak dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditentukan". Pengertian seperti yang tertuang dalam undang-undang tersebut masih terasa cukup luas. Namun dari penjelasan undang-undang tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kredit adalah adanya suatu penyerahan uang atau tagihan atau dapat juga barang yang menimbulkan tagihan tersebut kepada pihak lain, dengan harapan memberi pinjaman ini bank akan memperoleh suatu tambahan nilai dari pokok pinjaman tersebut

yang berupa bunga sebagai pendapatan bagi bank yang bersangkutan. Dari proses kredit itu telah didasarkan pada suatu perjanjian yang saling mempercayai kedua belah pihak akan mematuhi kewajibannya masing-masing. Dalam pemberian kredit ini terkandung kesepakatan pelunasan hutang dan bunga akan diselesaikan dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati bersama. Untuk dapat melaksanakan kegiatan perkreditan secara sehat maka dikenal dengan adanya prinsip-prinsip perkreditan yang terdiri dari 5C atau juga ada yang menyebutnya sebagai prinsip 6C, meliputi :

1. Character

Yaitu pemberian kredit yang berdasarkan pada keyakinan dari pihak bank bahwa si peminjam mempunyai moral, watak ataupun sifat-sifat pribadi yang potensi dan kooperatif dan juga mempunyai rasa tanggung jawab baik dalam kehidupan pribadi sebagai manusia, kehidupannya sebagai anggota masyarakat ataupun dalam menjalankan kegiatan usahanya.

2. Capacity

Yaitu suatu penilaian kepada calon debitur mengenai kemampuan melunasi kewajiban-kewajibannya dari kegiatan usaha yang dilakukannya atau kegiatan usaha yang akan dibiayai dengan kredit dari bank.

3. Capital

Yaitu jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh calon debitur. Hal ini kelihatannya kontradiktif dengan tujuan kredit yang berfungsi sebagai penyedia dana. Namun memang demikianlah halnya dalam kaitannya di dalam business yang murni, semakin kaya seseorang ia semakin dipercaya untuk memperoleh kredit.

4. Collateral

Yaitu barang-barang jaminan yang diserahkan oleh peminjam atau debitur sebagai jaminan atas kredit yang diterimanya. Manfaat collateral

yaitu sebagai alat pengaman apabila usaha yang dibiayai dengan kredit gagal atau sebab-sebab lain dimana debitur tidak mampu melunasi kreditnya dari hasil usahanya yang normal.

5. Condition of Economy

Yaitu situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya dan lain-lain yang mempengaruhi keadaan perekonomian pada suatu saat maupun untuk suatu kurun waktu tertentu yang kemungkinan akan dapat mempengaruhi kelancaran usaha dari perusahaan yang memperoleh kredit.

6. Constrain

Yaitu batasan-batasan atau hambatan-hambatan yang tidak memungkinkan seseorang melakukan business disuatu tempat.

2.2.6. Kebijakan Perkreditan

Berbicara soal perkreditan sebetulnya tidak dapat dilepaskan dari masalah-masalah lain yang ada dalam suatu kegiatan perbankan, secara minimal suatu bank dapat memberikan kredit kalau ia mempunyai dana yang mencukupi.

Untuk mengatasi berbagai kerumitan serta dalam upaya agar kegiatan perkreditan tersebut dapat berjalan dengan lancar, maka diperlukanlah suatu rangkaian peraturan-peraturan yang ditetapkan terlebih dahulu baik secara tertulis ataupun tidak tertulis sebelum pelaksanaan perkreditan itu sendiri berlangsung. Rangkaian peraturan ini disebut sebagai kebijakan kredit (credit policy). Dalam menetapkan kebijakan perkreditan tersebut harus diperhatikan 3 azas pokok yaitu :

1. Azas Likuiditas

Yaitu suatu azas yang mengharuskan bank untuk tetap dapat menjaga tingkat likuiditasnya, karena suatu bank yang tidak likuid akibatnya akan sangat parah yaitu hilangnya kepercayaan dari para nasabahnya atau dari masyarakat luas.

2. Azas Solvabilitas

Yaitu menerima simpanan dana dari masyarakat dan disalurkan dalam bentuk kredit dan kredit-kredit yang diberikan tersebut harus dapat dikembalikan oleh para debitur tepat waktunya sesuai dengan yang telah diperjanjikan agar tidak merusak schedule perencanaan kredit yang telah disusun.

3. Azas Rentabilitas

Yaitu setiap kegiatan usaha yang mengharapkan untuk memperoleh laba, baik untuk mempertahankan eksistensinya maupun untuk keperluan mengembangkan dirinya.

2.2.7. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Besarnya Permintaan Kredit BPR

1. Suku Bunga

Dalam pengertian ini, yaitu harga yang dibebankan oleh unit ekonomi yang mengalami surplus, pada unit ekonomi yang mengalami defisit atas pinjaman yang diberikan dari tabungannya. Suku bunga juga berarti harga sewa yang diterima oleh unit surplus karena menyediakan dana bagi unit defisit. Suku bunga terdiri dari suku bunga tetap (suku bunga kupon tertentu) yang dibayarkan atas sejumlah uang yang dipinjam atau sejumlah uang tertentu yang diterima dengan mendiskontokan nilai dari kewajiban utang. Keynes berpendapat bahwa bunga itu adalah semata-mata adalah gejala moneter, bunga itu adalah sebuah pembayaran untuk menggunakan uang. Tingkat bunga tidak lain adalah harga yang terjadi di pasar uang dan modal. Jadi tingkat bunga mempunyai fungsi alokatif dalam perekonomian, khususnya dalam penggunaan uang atau modal (Nopirin, 1985:170).

Menurut mashab klasik bunga timbul karena uang adalah produktif, dalam arti bahwa dengan dana ditangan seorang pengusaha bisa menambah

alat produksinya (modal) yang bisa menghasilkan keuntungan yang tinggi. Dengan kata lain, uang bisa meningkatkan produktifitas, karena hal inilah maka orang mau membayar bunga. Kaum klasik memandang uang sebagai dana investasi (Leonable funds) yang langsung dikaitkan dengan kemungkinan peningkatan produksi barang dan jasa.

Menurut mashab keynesian, uang bisa produktif dengan cara lain. Dengan uang tunai ditangan bisa berspekulasi di pasar surat berharga dengan kemungkinan memperoleh keuntungan. Dan karena adanya kemungkinan keuntungan ini orang mau membayar bunga. Kaum keynesian lebih menekankan sifat uang sebagai satu aktiva yang likuid yang bisa digunakan untuk memanfaatkan kesempatan memperoleh keuntungan dari pasar surat berharga (Boediono, 1986:83).

Di dalam perencanaan kredit penetapan suku bunga kredit juga merupakan faktor yang perlu dipikirkan secara baik karena dalam pasar yang bersaing harga (suku bunga kredit) juga akan berpengaruh terhadap proses pemasaran kredit-kredit tersebut kemasyarakat usaha.

Bunga kredit turut pula mempengaruhi kelancaran kredit perbankan, dengan rendahnya suku bunga kredit mungkin sekali meringankan usaha nasabah sehingga usahanya dapat berkembang karena beban biaya modal pinjaman rendah. Rendahnya suku bunga kredit juga dapat memperlancar arus pengambilan pinjaman, bagi pihak bank rendahnya suku bunga kredit memberikan persentase pendapatan yang rendah.

Sebaliknya bila suku bunga kredit suatu bank ditetapkan tinggi diharapkan pendapatan bank akan mencapai persentase yang tinggi pula. Namun bila dilihat dari segi nasabah tingginya suku bunga kredit akan membebani usahanya mengakibatkan perusahaannya kurang berkembang sehingga mungkin sekali arus pengembalian kredit menjadi kecil dan melambatnya pengembalian bunga mengakibatkan volume kredit yang disalurkan akan mengecil dan pendapatan bank menjadi turun.

Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam penetapan suku bunga bank yaitu :

1. Faktor nasabah, di dalam kondisi pasar yang bersaing harga akan terjadi pada titik kesepakatan antara pembeli dan penjual.
2. Bank pesaing, untuk merebut nasabah sebanyak mungkin sesuai masing-masing target, harga atau dalam hal ini tingkat suku bunga kredit akan merupakan faktor yang juga menentukan.
3. Mutu pelayanan, para pengusaha dalam melaksanakan kegiatannya selalu berharap akan memperoleh kepastian, ia berani membayar lebih mahal untuk memperoleh kepastian tersebut.
4. Resiko usaha, adanya resiko-resiko yang akan dihadapi oleh para pengusaha ini perlu diperhitungkan oleh bank dalam penetapan suku bunga kreditnya.

2. Agunan (Jaminan Kredit)

Agunan atau jaminan kredit diartikan secara umum sebagai penyerahan kekayaan atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggung pembayaran kembali suatu hutang. Agunan adalah identik dengan collateral dalam prinsip 6C dalam pemberian kredit yaitu barang-barang jaminan yang diserahkan oleh peminjam atau debitur sebagai jaminan atas kredit yang diterimanya (Teguh Pudjo Mulyono, 1989:5). Sesuai dengan SK Direktur Bank Indonesia No. 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang jaminan pemberian kredit pasal 3 yang dimaksud agunan adalah jaminan material, surat berharga, garansi resiko yang disediakan oleh debitur untuk menanggung pembayaran kembali suatu kredit apabila debitur tidak dapat melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan. Agunan dapat berupa barang, proy atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan, dan barang lain surat berharga atau garansi resiko yang ditambahkan sebagai agunan tambahan.

Jaminan kredit menduduki posisi yang penting terutama dalam fungsinya untuk pengamanan kredit yang diberikan. Dalam hal ini dapat diibaratkan penyelesaian kredit melalui barang jaminan adalah sebagai penggunaan senjata pamungkas (untuk penyelesaian usaha terakhir). Oleh karena itu tidaklah berlebihan para analis kredit diminta kejeliannya atau ketelitiannya dalam menganalisis barang-barang jaminan. Sasaran analisis adalah :

1. Nilai ekonomis barang jaminan
2. Nilai yuridis barang jaminan

Secara umum nilai ekonomis suatu barang harus lebih besar dibandingkan dengan jumlah kredit yang diberikan, nilai barang jaminan konstan, barang jaminan dapat dijual di pasar bebas dan tidak cepat rusak. Syarat-syarat yuridis barang jaminan harus milik nasabah, tidak berada dalam sengketa dan ada bukti pemilikan.

Semakin tinggi nilai ekonomis suatu barang jaminan maka jumlah kredit yang diterima juga semakin besar, hal ini disebabkan karena pihak bank tidak mau mengambil resiko dari barang jaminan tersebut. Karena semakin tinggi nilai barang jaminan maka resiko yang dihadapi bank akan semakin kecil dibandingkan dengan volume atau nilai barang yang dijamin.

Kegunaan jaminan atau agunan adalah untuk :

1. Memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dari hasil penjualan barang-barang jaminan tersebut, apabila nasabah melakukan cidera janji, yaitu tidak membayar kembali hutangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian.
2. Menjamin agar nasabah berperan serta di dalam transaksi untuk membiayai usahanya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha atau proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya, dapat

dicegah atau sekurang-kurangnya kemungkinan untuk dapat berbuat demikian diperkecil jadinya.

3. Memberi dorongan kepada debitur untuk memenuhi perjanjian kredit. Khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui agar tidak kehilangan kekayaan yang telah dijamin kepada bank.

Kebijaksanaan Penilaian Barang Jaminan

Nilai dari suatu barang jaminan akan sangat bervariasi dari satu benda ke benda yang lain, atau antara satu lokasi dengan lokasi yang lain maupun antara satu waktu dengan waktu yang lain. Untuk itu ada beberapa kriteria dalam penilaian barang jaminan :

1. Nilai Perolehan (cost of acquisition)
Yaitu nilai atau sejumlah uang yang dibayarkan untuk memperoleh sesuatu barang sesuai dengan fungsinya.
2. Nilai Buku (book value)
Yaitu nilai perolehan dikurangi dengan besarnya depresiasi, depresi atas barang yang bersangkutan.
3. Nilai Ganti (replacement cost)
Yaitu nilai yang dikeluarkan untuk memperoleh kembali barang serupa atau dapat juga disebut reconstruction cost.
4. Nilai Atas Dasar Penilaian Kembali (reappraisal value)
Yaitu nilai suatu barang yang ditetapkan kembali karena adanya proses penurunan daya beli uang yang digunakan untuk mengukur nilai barang yang bersangkutan pada waktu yang lalu.
5. Nilai Pasar (market value)
Yaitu nilai rata-rata dari barang serupa yang dipasarkan di pasar umum.
6. Nilai Jual (resale value)
Yaitu nilai yang diperoleh dari hasil penjualan barang-barang tersebut.

3. Tingkat Pendapatan

Pendapatan terdiri dari penghasilan berupa upah, bunga, sewa, deviden, keuntungan dan merupakan suatu arus yang diukur dalam jangka waktu misalnya, satu minggu, satu bulan, satu tahun, atau jangka waktu yang lama. Menurut Mulyono Sumardi (1983:34) sumber pendapatan masyarakat berasal dari :

- a. Pendapatan sektor formal, yaitu pendapatan yang telah diterima sebagai balas jasa dari sektor formal yang terdiri dari pendapatan berupa barang dan jasa.
- b. Pendapatan sektor informal, yaitu pendapatan yang berasal dari usaha investasi dan keuntungan sosial.
- c. Pendapatan sektor subsisten, yaitu pendapatan yang terjadi bila produksi dan konsumsi berada dalam suatu masyarakat kecil.

Pendapatan adalah merupakan penghasilan bersih yang diterima oleh seseorang sebagai akibat dari melakukan sesuatu kegiatan usaha. Penghasilan bersih yang diterima merupakan total penerimaan (TR) dikurangi dengan total biaya yang dikeluarkan (Sudarsono, 1982:236).

Secara umum pendapatan pribadi atau personal income (PI) menunjukkan semua jenis pendapatan, baik yang diperoleh karena berfungsi sebagai faktor produksi, maupun tanpa memberikan suatu kegiatan apapun yang diterima oleh penduduk suatu negara. Disposable income adalah sejumlah uang yang dibelanjakan oleh penerima untuk membeli barang dan jasa sesuai dengan keinginannya. Konsep pendapatan inilah yang digunakan masyarakat untuk :

- a. Pengeluaran konsumsi termasuk pembayaran bunga pinjaman.
- b. Tabungan pribadi netto.

Semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang atau keluarga maka akan semakin besar kredit yang diterima. Hal ini dikarenakan pihak bank beranggapan bahwa semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang atau

keuarga maka mereka akan dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagai debitur atau penerima kredit dan begitu juga sebaliknya semakin rendah tingkat pendapatan seseorang atau keluarga maka jumlah kredit yang diterima juga semakin kecil.

Pihak bank menilai debitur yang memiliki tingkat pendapatan rendah tidak akan dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya tepat jatuh tempo dan begitu juga sebaliknya. Hal ini kelihatannya kontradiktif dengan tujuan kredit yang berfungsi sebagai penyedia dana, namun memang demikianlah halnya dalam kaitannya di dalam bussines yang murni semakin kaya seseorang maka ia semakin dipercaya untuk memperoleh kredit.

2.2.8. Perkembangan BPR

Jumlah BPR yang terdapat di Jawa Timur yang meliputi Surabaya, Malang, Kediri dan Jember sampai dengan posisi Desember 2003 adalah sebanyak 426, diantaranya 7 BPR beroperasi berdasarkan prinsip syariah.

Perkembangan kegiatan usaha dan keuangan BPR di Jawa Timur, selama triwulan IV/2003 dibandingkan dengan triwulan sebelumnya memperlihatkan pertumbuhan yang menggembarakan tergambar dalam :

- a. Total Asset mencapai Rp. 1,25 triliun meningkat sebesar Rp. 117,95 milyar (10,46%).
- b. Dana masyarakat yang berhasil dihimpun mencapai Rp. 763,35 milyar meningkat sebesar Rp. 61,9 milyar (8,82%).
- c. Kredit yang disalurkan mencapai Rp. 912,80 milyar meningkat sebesar Rp. 43,45 milyar (5%) dan
- d. Laba yang dihasilkan mencapai Rp. 75,74 milyar meningkat sebesar Rp. 14,66 milyar (24%).

Tabel 2.2.8. Perkembangan Usaha BPR (Rp juta)

Keterangan		2002	2003				Pert
		IV	I	II	III	IV	q-t-q
ASSET	Surabaya	340.940	372.797	399.209	432.303	477.295	10.41
	Malang	231.241	239.987	276.272	284.684	302.309	6.19
	Kediri	205.973	221.669	241.001	261.360	289.261	10.68
	Jember	122.363	128.811	147.397	149.379	176.810	18.36
	Total	900.517	963.264	1.063.483	1.127.726	1.245.675	10.46
DP III	Surabaya	228.830	252.874	264.967	275.778	300.003	8.78
	Malang	154.211	166.436	181.226	185.322	197.027	6.32
	Kediri	122.647	131.654	140.830	152.728	162.170	6.18
	Jember	73.284	77.660	86.579	87.622	104.150	18.86
	Total	578.972	628.624	673.602	701.450	763.350	8.82
KREDIT	Surabaya	265.527	268.777	305.188	326.842	335.249	2.57
	Malang	186.769	187.815	220.331	225.580	232.273	2.97
	Kediri	159.858	160.656	181.807	198.929	212.503	6.82
	Jember	86.691	87.288	109.628	117.992	132.772	12.53
	Total	698.845	704.536	816.954	869.343	912.797	5.00
LABA	Surabaya	18.548	5.331	11.147	17.641	20.669	17.16
	Malang	9.224	4.296	9.595	14.867	17.750	19.39
	Kediri	18.433	6.983	13.987	21.284	25.988	22.10
	Jember	5.361	2.512	4.817	7.290	11.337	55.51
	Total	51.566	19.122	39.546	61.082	75.744	24.00

Sumber : Bank Indonesia, 2003.

Pertumbuhan asset, dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun, kredit yang disalurkan dan laba yang dihasilkan dari BPR selama triwulan IV terjadi disemua wilayah Kantor Bank Indonesia Jawa Timur, yang terbesar dihasilkan oleh BPR-BPR yang terdapat di daerah KBI Jember. Pertumbuhan yang positif tersebut memberikan gambaran bahwa sektor ekonomi atau usaha kecil dan mikro tumbuh dengan baik.

Berdasarkan jenis penggunaan, kredit yang disalurkan kepada modal kerja mencapai 82,1% diikuti oleh kredit investasi 16,1% dan kredit konsumsi 1,8%. Sedangkan dari sembilan sektor ekonomi hanya lima sektor ekonomi yang dibiayai oleh BPR, yaitu sektor perdagangan, sektor lainnya, sektor pertanian, sektor jasa dan sektor perindustrian masing-masing sebesar 50,8%, 20,4%, 15,3%, 9,6%, dan 3,9%.

$$n_i = \frac{N_i}{N} Xn$$

Dimana :

- n_i = Jumlah sampel pada tiap strata
- N_i = Jumlah populasi pada tiap strata
- N = Jumlah populasi seluruh strata
- n = Jumlah sampel seluruhnya

3.3. Sumber Data

1. Data Primer, adalah data yang diperoleh langsung dari debitur yang dipilih sebagai responden, data tersebut meliputi motif dari debitur dalam mengajukan pinjaman kepada BPR di Kabupaten Jember.
2. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan-laporan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan masalah.

3.4. Metode Analisis Data

1. Analisis Regresi Linier Berganda

Untuk mengetahui seberapa besar faktor-faktor yang berpengaruh terhadap jumlah kredit yang diminta digunakan analisis regresi linier berganda sebagai berikut (J. Supranto, 1983:60).

$$Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + E$$

Dimana :

- Y = Besarnya permintaan kredit
- b_0 = Konstanta



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Daerah Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Jember, pemilihan lokasi dilakukan atas dasar pertimbangan :

1. Kabupaten Jember merupakan salah satu kota administratif di Propinsi Jawa Timur sedang mengalami pertumbuhan dan terus berkembang dengan prospek baik di masa mendatang.
2. BPR yang berlokasi di Kabupaten Jember adalah BPR yang telah lama beroperasi dan terus mengalami perkembangan serta turut memberikan saham dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi utamanya dalam pemberian pinjaman atau modal bagi pengusaha kecil petani dan beberapa jenis usaha di sektor informal di Kabupaten Jember.

3.2. Metode Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel dilakukan secara stratified proporsional random sampling. Artinya dalam pengambilan sampel ini dilakukan secara acak dengan memperhatikan pembagian wilayah kerja. Jumlah sampel yang diambil sebesar 5% dengan perincian seperti dalam tabel 3.2 di bawah ini :

Tabel 3.2. Proporsional sampel

Nama BPR	Jumlah Nasabah	Jumlah Sampel
Eka Darma Adi (Ambulu)	104	5 orang
Bintang Niaga (Rambipuji)	520	26 orang
Arjasa	130	7 orang
Eka D. Adi (Mayang)	156	8 orang
Kalisat	78	4 orang

Sumber : BPR Kabupaten Jember, 2004.

$b_{1,2,3}$ = Konstanta

X_1 = Agunan

X_2 = Tingkat bunga

X_3 = Pendapatan

E = Kesalahan pengganggu (disturbance error) dimana $E = 0$

2. Statistik uji F, untuk menguji adanya signifikansi secara bersama variabel bebas yang dimasukkan kedalam model terhadap variabel terikat, formulasi yang digunakan sebagai berikut (J. Supranto, 1983:268)

$$F_{hitung} = \frac{R^2 / k - 1}{(1 - R^2) / (N - k)}$$

Dimana :

R^2 = Koefisien determinasi

k = Banyaknya kelompok

N = Jumlah sampel

Kriteria pengujian :

- Apabila $F_{hitung} \geq \alpha$ 0,05 H_0 diterima dan H_1 ditolak. Berarti ada pengaruh antara tingkat bunga, tingkat pendapatan dan agunan terhadap permintaan kredit.
- Apabila $F_{hitung} \leq \alpha$ 0,05 H_0 ditolak dan H_1 diterima. Berarti tidak ada pengaruh antara tingkat bunga, tingkat pendapatan dan agunan terhadap permintaan kredit.

Jika penelitian hendak membuktikan apakah hasil pengujian tersebut signifikan atau tidak, maka diperlukan hipotesis statistik. Dalam statistik terdapat dua hipotesis yaitu H_0 dan H_1 . H_0 atau hipotesis nol adalah dugaan sementara dari peneliti, dalam hipotesis statistik H_0 atau hipotesis nol inilah yang diuji karena peneliti tidak berharap ada perbedaan dalam sampel

penelitian. Sedangkan H_1 atau hipotesis alternatif adalah kebalikan dari H_0 dari tabel. Bila hasil pengujian menyimpulkan bahwa H_0 ditolak maka H_1 diterima.

3. Statistik uji t, yang menunjukkan pengaruh tiap variabel secara individual dikontrol oleh variabel bebas lain pada persamaan yang bersangkutan dalam menerangkan variabel terikat. Rumus statistik uji t sebagai berikut (J. Supranto, 1983:325).

$$t_{hitung} = \frac{b_i}{S_{b_i}}$$

Kriteria pengujian :

- a. Apabila $t_{hitung} \geq \alpha$ 0,05 H_0 ditolak dan H_1 diterima. Berarti ada pengaruh yang berarti antara variabel-variabel bebas X_1, X_2, X_3 dengan variabel terikat Y.
- b. Apabila $t_{hitung} \leq \alpha$ 0,05 H_0 diterima dan H_1 ditolak. Berarti tidak ada pengaruh yang berarti antara variabel-variabel bebas X_1, X_2, X_3 dengan variabel terikat Y.

Besarnya sumbangan yang diberikan oleh variabel-variabel X terhadap Y secara bersama dapat diketahui melalui analisis koefisien determinasi dengan formula (J. Supranto, 1983:206).

$$R^2 = \frac{\sum \hat{y}_i^2}{\sum y_i^2}$$

Dimana :

$$y_i^2 = (y - \bar{y})^2$$

$$\hat{y}_i^2 = b_1 \sum X_{1i} y_i + b_2 \sum X_{2i} y_i + b_3 \sum X_{3i} y_i$$

4. Untuk mengadakan uji signifikan terhadap bentuk model Multiple Regresi, digunakan metode analisis varian (anavar) yang disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel Analisis Varian Empat Variabel

Sumber Variasi	Derajat Bebas	Jumlah Kwadran SS)	Rata-Rata Kwadran (MSS)
Regresi/ESS	3	$\sum Y_i^2 = b_1 \sum X_{1i} Y_i + b_2 \sum X_{2i} Y_i + b_3$	$ESS/df = \sum Y_i^2 / 3$
Kesalahan Pengganggu/ RSS	(n-4)	$\sum e_i^2 = \sum (Y - Y)^2$	$RSS/df = S_e^2 = \sum e_i^2 / n - 4$
TSS	(n-1)	$\sum Y_i^2 = \sum (Y - Y)^2$	

3.5. Definisi Operasional

Definisi disini dimaksudkan untuk menghindari adanya salah pengertian tentang istilah yang digunakan dalam penelitian ini :

1. Permintaan kredit adalah jumlah kredit yang diminta oleh debitur untuk memenuhi kebutuhannya baik digunakan untuk produktif maupun konsumtif.
2. Tingkat bunga pinjaman adalah imbalan atas penggunaan sejumlah uang berdasarkan perjanjian pinjam meminjam.
3. Agunan adalah jaminan material, surat berharga, garansi resiko yang diberikan oleh debitur untuk menanggung pembayaran kembali surat kredit apabila debitur tidak dapat melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan (dalam rupiah/Rp)
4. Tingkat pendapatan adalah penerimaan total keluarga atau pribadi dalam satu periode (bulan atau tahun) baik dari hasil produksi, balas jasa atas pengorbanan yang dilakukan ataupun dari usaha lainnya.



BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum

4.1.1. Sejarah Pendirian Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat yang pertama berdiri di Indonesia yaitu di Kabupaten Purwokerto, didirikan oleh Patih R. Bei Aria Wirjaatmodjo dengan nama "Hulp En Spaarbank Voor Indlandsche Bestuurs Ambtenaren" atau Bank bantuan dan tabungan pegawai pemerintahan bangsa Indonesia. Bank tersebut mula-mula merupakan bank pegawai atau bank priyayi. Adapun tujuan dari pada bank itu adalah untuk membantu para pegawai negeri bangsa Indonesia agar tidak jatuh kedalam cengkeraman para pelepas uang atau rentener.

Di samping kepada pegawai negeri bank itupun memberikan bantuannya kepada para petani dan tukang. Sebagai lembaga perkreditan yang masih baru tentunya bank tersebut tidak terlepas dari berbagai kelemahan dan kekurangan. Kebetulan sekali pada tahun 1897 asisten presiden E. Sieburgh digantikan oleh asisten presiden W.P.D. de Wolff Van Westerrode, yang ternyata mempunyai minat dan perhatian yang besar sekali terhadap perkreditan rakyat khususnya kredit pertanian. Karena itu ia pun segera mengadakan perbaikan dan reorganisasi terhadap bank bantuan dan tabungan di Purwokerto tersebut dan menjadikan bank itu menjadi bank bantuan, tabungan dan kredit pertanian dengan nama "Poerwokwrtosche Hulp, Spear en Landbouwcrediet Bank". Dan sebagaimana diuraikan diatas ternyata bank tersebut perlu untuk diadakan reorganisasi, karena masih banyak kekurangan dalam organisasinya. Langkah yang diambil dalam melakukan reorganisasi adalah :

- a. Mengusahakan agar bank mempunyai badan hukum.

- b. Usaha-usaha untuk menjamin solidaritas dari bank dengan menetapkan peraturan-peraturan yang tetap untuk pelaksanaan pengurusan dan untuk menyusun pembukuan yang jelas dan teliti.
- c. Untuk mengatasi kekurangan modal kerja maka bank yang mula-mula merupakan perkumpulan para kepala-kepala dan pegawai negeri golongan pribumi, dibuka pula keanggotaannya untuk pegawai-pegawai pemerintah, orang-orang Eropa dan orang-orang lain yang berminat.
- d. Memperluas bidang pekerjaan dari bank yang semua membantu kebutuhan pinjaman para kepala dan pegawai negeri golongan pribumi tetapi juga kepada setiap penduduk Kabupaten (afdeling) Purwokerto yang memerlukannya dan dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan, kecuali orang-orang timur asing (Vreemde Oosterlingen) sebab dengan mereka bank tidak ingin berhubungan dan lembaga kredit pertanian dalam Kabupaten (afdeling) Purwokerto.

Menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang baru dari bank maka diatur hal-hal sebagai berikut :

Tujuan Bank :

- a. Bank bertujuan untuk memberikan bantuan pinjaman kepada kepala-kepala dan pegawai negeri bumi putera dan juga penduduk Kabupaten Purwokerto dari golongan pribumi dan Eropa yang memerlukannya, dengan bunga yang cukup wajar, agar mereka tidak jatuh ke tangan para pelepas uang atau rentenir.
- b. Kepala mereka yang tersebut dalam butir a diberi kesempatan untuk menabung dengan kepastian dan bunga yang pantas, sehingga bank juga bertugas untuk merangsang penabung.
- c. Kepada kumpulan petani-petani bumi putera di Kabupaten Purwokerto bank memberikan kredit pertanian yang murah, apabila mereka memerlukannya.

Keanggotaan :

Anggota-anggota dari bank terdiri dari kepala-kepala dan pegawai-pegawai negeri bangsa Indonesia dan juga para pegawai negeri bangsa Eropa serta orang-orang swasta yang berminat. Pegawai-pegawai negeri dan kepala-kepala membayar iuran sesuai dengan gajinya, anggota lainnya akan disahkan menjadi anggota apabila telah menyimpan f. 50 atau lebih pada bank. Untuk itu orang-orang Indonesia yang menjadi anggota maka dalam hal hak dan kewajiban yang timbul karena keanggotaan tersebut, mewajibkan mereka tunduk kepada hukum yang berlaku bagi orang-orang Eropa (Bulgelijk Recht En Handelsrecht).

Pengurus :

Pengurus dari perkumpulan (bank) adalah dibawah pengawasan dua orang komisaris yang bertempat tinggal di Kabupaten. Pengurusnya terdiri atas lima orang anggota dari perkumpulan, yang menjabat sebagai seorang presiden (ketua), seorang wakil presiden (wakil ketua), seorang sekretaris, seorang bendahara dan seorang bendahara pengganti haruslah orang-orang Eropa sedangkan wakil ketua dan bendahara seyogyanya adalah orang Indonesia. Anggota pengurus dan para komisaris dipilih untuk masa jabatan satu tahun yaitu dalam Rapat Umum pada bula Januari, dan mereka segera dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya.

Permodalan Dan Dana-Dana :

Permodalan dari bank yang merupakan modal usaha dari perkumpulan tidak boleh melebihi f. 12.000 sedangkan dana-dana dari bank diperoleh dari simpanan berupa tabungan dan deposito. Apabila modal usaha melebihi keperluan pemberian pinjaman, maka kelebihanannya dipergunakan untuk mengembalikan deposito. Maka selalu diusahakan agar apabila banyak pemasukan uang tabungan, maka uang itu dipergunakan

untuk mengembalikan deposito. Dan apabila uang tabungan itu melebihi kebutuhan dari pinjaman, maka kelebihan uang tabungan itu disimpan pada sebuah bank yang solid di Hindia Belanda (Indonesia). Bunga tabungan dan bunga deposito ditetapkan oleh bank sebesar 6% setahun.

Pinjaman :

Mengenai pinjaman ini bank dapat memberikan bantuannya kepada setiap penduduk Kabupaten (afdeling) Purwokerto yang memerlukannya, asal dapat memberikan tanggungan yang ditetapkan oleh bank, serta uang pinjaman tersebut dipergunakan untuk keperluan yang diizinkan dan bermanfaat yaitu uang pinjaman tersebut tidak dipinjamkan lagi dengan bunga yang lebih tinggi atau untuk membeli perhiasan. Adapun ketentuan-ketentuan dalam pemberian pinjaman adalah sebagai berikut :

- a. Bank dapat memberikan pinjaman kepada orang-orang yang mempunyai gaji tetap, pensiun, dan tunjangan yang dibayarkan oleh kas negeri, tanpa borg (penanggung) sampai sejumlah gaji, pensiun, uang tunggu dan tunjangan setiap bulan.
- b. Kepada mereka yang ingin meminjam melebihi jumlah satu bulan gaji, pensiun, dan juga kepada orang-orang swasta dan jumlah yang diminta oleh kedua golongan tersebut menurut pertimbangan pengurus sesuai dengan tanggungannya, harus ada sekurang-kurangnya seorang penanggung (borg).
- c. Bank dapat memberi pinjaman dengan jaminan surat-surat berharga atau barang-barang berharga lainnya sampai jumlah lebih dari f. 100.
- d. Bank dapat memberi kredit secara hipotik dan juga dengan jaminan rumah, mengenai hal ini, caranya akan ditetapkan oleh pengurus (cara yang ditetapkan pengurus adalah menjual dengan hak membeli kembali atau "jual gade").

- e. Kepada kumpulan petani yang sekurang-kurangnya terdiri dari 10 orang yang bersama-sama bertanggung jawab atas hutang kepada bank tersebut atau tanggung renteng. Pinjaman ini berjangka kurang dari enam bulan. Dan apabila dianggap perlu oleh pengurus maka bank dapat memberikan pinjaman tersebut.
- f. Bank juga memberi pinjaman-pinjaman kecil kepada para pegawai negeri, penerima pensiun, dan tunjangan sebesar 1/8 dari penghasilannya dengan maksimal f. 25 yang harus dilunasi sehari setelah penerimaan gaji, pensiun, atau tunjangan tersebut.

Poerwokertosche Hulp Spaaren Landbouwcrediet Bank disahkan oleh pemerintah dengan Ordonantie tanggal 11 Agustus 1897, Staatsblad No. 205, dan dimuat dalam Javasche Courant pengurusnya adalah sebagai berikut (Drs. Pandu Suharto, 1988:33-39).

Presiden (Ketua)	: WPD de Wolff van westerrode
Wakil Presiden (Wakil Ketua)	: Raden Atmodoebroto
Sekretaris	: A.L Schiff
Bendahara	: Raden Wirjoatmojo
Bendahara Pengganti	: E.Q Abels
Komisaris	: C.J.N Byvanck, M.C Brandes

4.1.2. Peranan BPR Dalam Rangka Kebijakan Pakto

Pakto 27 merupakan kebijakan keuangan, moneter dan perbankan untuk menderegulasi pendirian bank di Indonesia, sehingga bank dapat dijangkau oleh masyarakat pedesaan. Peranan BPR dalam rangka kebijakan Pakto tentunya harus memenuhi keinginan dari pemerintah mengenai kegiatan yang harus dilakukan oleh BPR dalam sistem perbankan Indonesia.

Dalam konsiderans keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1988 tentang Bank Perkreditan Rakyat, antara lain disebutkan

bahwa BPR didirikan guna memenuhi kebutuhan pelayanan akan jasa-jasa perbankan dan untuk menunjang kegiatan perekonomian masyarakat pada umumnya. Sedangkan tugas dari BPR diatur di dalam keputusan Menteri Keuangan Nomor 1064/KMK.00/1988, yang menentukan bahwa tugasnya diarahkan untuk menunjang pertumbuhan dan modernisasi ekonomi pedesaan serta untuk mengurangi praktek ijon dan para pelepas uang. Untuk melaksanakan usahanya maka BPR dapat :

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito berjangka dan tabungan.
2. Memberikan kredit bagi pengusaha kecil atau masyarakat pedesaan.

Pada bulan Maret tahun 1989 diadakan perbaikan dari peraturan Pakto, yaitu dengan :

1. Keputusan menteri keuangan RI Nomor 278/KMK.01/1989 tentang peleburan usaha dan penggabungan usaha bank.
2. Keputusan menteri keuangan RI Nomor 279/KMK.01/1989 tentang penyempurnaan keputusan menteri keuangan RI Nomor 1064/KMK.00/1988 tentang pendirian dan usaha Bank Perkreditan Rakyat.

Di dalam keputusan-keputusan itu antara lain ditetapkan bahwa :

- a. BPR dapat menggabungkan usahanya dengan bank umum, bank pembangunan swasta nasional dan dengan BPR lain.
- b. BPR lama diperbolehkan tetap berada di lokasinya semula.
- c. Semua BPR tidak diperkenankan menerima simpanan dalam bentuk Giro.
- d. BPR baru dibolehkan membuka kantor-kantor cabang di kecamatan-kecamatan lain di luar ibu kota negara, propinsi, dan kabupaten di seluruh Indonesia.

4.1.3. Prospek BPR Yang Berkaitan Dengan Fungsinya

BPR memberikan pelayanan perbankan kepada masyarakat kecil di daerah-daerah pedesaan dan di kota-kota, tetapi karena sebagian besar dari permohonan pendirian BPR baru lokasinya menempel pada kota-kota besar maka perlu dipertanyakan apa maksud pemilik BPR baru untuk mendirikan BPR, misalnya :

1. Untuk melaksanakan fungsi BPR.
2. Untuk batu loncatan menjadi cabang bank umum.
3. Untuk melaksanakan fungsi bank umum dengan melayani masyarakat golongan menengah ke atas.

Meskipun menurut Pakto BPR baru didirikan di luar ibukota kabupaten, propinsi dan negara tetapi kenyataannya adalah bahwa banyak permohonan pendirian BPR baru adalah di kecamatan-kecamatan yang menempel dengan kota-kota besar seperti Surabaya dan Jakarta dan kota-kota lainnya.

- a. Bagi mereka yang bermaksud untuk melakukan fungsinya menurut ketentuan Pakto prospeknya telah diuraikan dalam butir 1 dan 2.
- b. Mereka yang mendirikan BPR sebagai batu loncatan menjadi bank umum tentunya ada kemungkinannya, karena keputusan menteri keuangan RI Nomor 128 Tahun 1989 memberikan peluangnya. Bank umum baru tentunya tidak dapat segera membuka cabang-cabang. Baru setelah dua tahun bank tersebut diperkenankan untuk membuka cabang itupun kalau dinilai sehat oleh Bank Indonesia.
- c. Bagi mereka yang mendirikan BPR untuk melaksanakan fungsi Bank Umum, tentunya mengharapkan bahwa BPR yang didirikan dapat dioperasikan sebagai bank umum. Karena BPR yang berada di kota-kota besar sebelum Pakto dapat melaksanakannya tanpa ada tindakan dari otoritas moneter.

4.2. Pembahasan

4.2.1. Pengaruh Agunan, Tingkat Bunga, Dan Tingkat Pendapatan Terhadap Permintaan Kredit

Penelitian yang dilakukan terhadap 50 responden nasabah BPR di Kabupaten Jember meliputi Ambulu, Rambipuji, Mayang, Kalisat dan Arjasa menunjukkan data tentang agunan, tingkat bunga dan tingkat pendapatan sebagai variabel-variabel bebas yang mempengaruhi permintaan kredit sebagai variabel terikat menggunakan metode Multiple Regresi. Berdasarkan perhitungan pada Lampiran II diperoleh persamaan sebagai berikut :

$$Y = 8.447,0560 + 0,1902 X_1 - 84.850,5964 X_2 + 0,2690 X_3$$

Dari persamaan tersebut dapat dijelaskan bahwa :

- Nilai konstanta $a = 8.447,0560$ menunjukkan bahwa tanpa adanya faktor-faktor agunan, tingkat bunga dan tingkat pendapatan jumlah kredit yang diminta sebesar 8.477,0560.
- Koefisien regresi agunan sebesar 0,1902 menggambarkan bahwa setiap dalam penambahan agunan sebesar satu rupiah akan meningkatkan jumlah kredit yang diminta sebesar 0,19 rupiah. Dengan asumsi bahwa variabel tingkat bunga dan tingkat pendapatan tetap. Hal tersebut berarti bahwa perubahan variabel agunan mempunyai dampak yang positif.
- Variabel tingkat bunga mempunyai koefisien regresi berganda sebesar $-84.850,5964$ yang pada hakekatnya mengukur besaran perubahan variabel dependen permintaan kredit (Y) sehubungan dengan perubahan variabel independen tingkat bunga (X_2) dengan asumsi variabel-variabel agunan dan tingkat pendapatan adalah konstan. Dengan kata lain apabila terjadi kenaikan satu persen pada tingkat bunga maka akan menyebabkan penurunan permintaan kredit sebesar 84.850,5964 rupiah dengan asumsi faktor-faktor agunan dan tingkat pendapatan tetap. Dampaknya mempunyai tendensi negatif, mempunyai arti bahwa apabila

nilai tingkat bunga meningkat maka permintaan kredit akan menurun, demikian pula sebaliknya apabila tingkat bunga menurun memberikan dampak naiknya permintaan kredit.

- d. Tingkat pendapatan mempunyai nilai koefisien regresi berganda sebesar 0,2690 yang pada dasarnya mengukur besaran perubahan variabel dependen permintaan kredit sehubungan dengan perubahan variabel independen tingkat pendapatan dengan asumsi variabel agunan dan tingkat bunga konstan. Dengan kata lain apabila terjadi perubahan Rp. 1000,- variabel tingkat pendapatan akan menyebabkan terjadinya perubahan permintaan kredit sebesar 269 rupiah dengan asumsi variabel lain konstan. Hal ini berarti perubahan variabel mempunyai dampak yang positif.

4.2.2. Pengujian Terhadap Keberartian Koefisien Regresi Pada Permintaan Kredit

Guna menguji keberartian dari koefisien regresi untuk mengetahui adanya pengaruh antara variabel-variabel independen agunan, tingkat bunga dan tingkat pendapatan dengan variabel dependen permintaan kredit maka digunakan cara uji koefisien regresi serentak maupun partial.

a. Uji Koefisien Regresi Serentak Atau Bersama

Untuk menguji koefisien regresi secara bersama-sama atau serentak dari variabel bebas agunan, tingkat bunga dan tingkat pendapatan terhadap permintaan kredit menggunakan F test kriteria yang disajikan dalam tabel 4.2.2. di bawah ini :

Tabel 4.2.2. Pengujian Koefisien Regresi Secara Bersama-Sama

Sumber Variasi	Derajat Bebas	Jumlah Kwadrat	Kwadrat Tengah	Fhitung	F α 0,05
Regresi	3	955980028392,32	318660009464,11	2601,5	2,84
Kesalahan	46	5634471607,69	22488513,21		
Jumlah	49		96161450000,01		

Sumber : Lampiran II

Dari hasil penelitian dengan menggunakan tingkat keyakinan 95% atau kesalahan 5% ternyata nilai dari F hitung 2601,56 dan nilai F α 0,05 sama dengan 2,84. Berarti F hitung > F α 0,05 yaitu F hitung 2601,56 > F α 0,05 yaitu 2,84. Dengan demikian secara nyata H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dapat dikatakan bahwa pengaruh regresi variabel-variabel agunan, tingkat bunga dan tingkat pendapatan secara keseluruhan sangat nyata mempengaruhi permintaan kredit BPR Kabupaten Jember.

b. Uji Koefisien Regresi Secara Partial

Guna menguji keberartian masing-masing koefisien regresi variabel-variabel independen terhadap variabel dependen digunakan statistik uji t.

Tabel Statistik Uji T Terhadap Koefisien Regresi Agunan, Tingkat Bunga Dan Tingkat Pendapatan.

Var Bebas	Koefisien Regresi	Korelasi Partial	Std. Error Koef. Regresi	t hitung	t α 0,05
X ₁	0,1902	0,3606	0,0373	5,093	1,684
X ₂	-84850,596	0,0150	101450,5038	-0,836	1,684
X ₃	0,2690	0,7636	0,0221	12,189	1,684

Sumber : Lampiran II

Dari hasil perhitungan tersebut maka pengujian hipotesis dapat dilakukan pada masing-masing variabel bebas sebagai berikut :

- a. Pengujian terhadap koefisiensi regresi agunan memberikan hasil bahwa t hitung mempunyai nilai 5,093 sedangkan $t \alpha 0,05$ yang diperoleh dari tingkat kepercayaan 95% mempunyai nilai 1,684. Berarti t hitung sama dengan $5,093 > t \alpha 0,05$ sama dengan 1,684. Dengan kata lain H_0 ditolak dan H_1 diterima atau hipotesis diterima, atau dengan kata lain agunan mempunyai pengaruh yang berarti secara nyata dengan permintaan kredit. Hal ini terbukti dengan diterimanya hipotesis.
- b. Pengujian terhadap koefisien regresi tingkat bunga memberikan hasil bahwa t hitung mempunyai nilai $-0,836$ sedangkan $t \alpha 0,05$ uji signifikan dua arah mempunyai nilai 1,684. Berarti t hitung sama dengan $0,836 < t \alpha 0,05$ sama dengan 1,684. Dengan demikian H_0 diterima dan H_1 ditolak atau hipotesis ditolak, dengan kata lain tingkat bunga kurang mempunyai pengaruh yang berarti secara nyata terhadap permintaan kredit. Hal ini terbukti dari ditolaknya hipotesis.
- c. Pengujian terhadap koefisien regresi tingkat pendapatan memberikan hasil bahwa t hitung mempunyai nilai 12,189 sedangkan nilai $t \alpha 0,05$ mempunyai nilai 1,684. Berarti t hitung sama dengan $12,189 > t \alpha 0,05$ sama dengan 1,684. Dengan demikian H_0 ditolak dan H_1 diterima atau hipotesis diterima, dengan kata lain tingkat pendapatan mempunyai pengaruh yang berarti secara nyata dengan permintaan kredit. Hal ini terbukti dengan diterimanya hipotesis.

Kriteria pengujian signifikan dua arah keberartian t test dengan menggunakan interval keyakinan 95% tersebut dapat digambarkan secara jelas dalam bentuk kurva normal pada lampiran IV, V dan VI.

4.2.1. Koefisien Korelasi Partial Dan Koefisien Determinasi Variabel Agunan, Tingkat Bunga Dan Tingkat Pendapatan Terhadap Variabel Permintaan Kredit

Guna mengetahui keeratan hubungan secara partial antara variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat digunakan analisis koefisien korelasi partial yang memberikan hasil sebagai berikut :

- a. Koefisien korelasi antara agunan terhadap permintaan kredit menunjukkan nilai 0,3606 yang mempunyai arti bahwa kalau tingkat bunga dan tingkat pendapatan tetap, maka sumbangan agunan terhadap variasi naik turunnya permintaan kredit sebesar 36,06%.
- b. Koefisien korelasi antara tingkat bunga terhadap permintaan kredit menunjukkan nilai 0,0150, yang mempunyai arti bahwa kalau tingkat pendapatan dan agunan tetap, maka sumbangan tingkat bunga terhadap variasi naik turunnya permintaan kredit sebesar 1,50%.
- c. Koefisien korelasi antara tingkat pendapatan terhadap permintaan kredit menunjukkan nilai 0,7636, yang mempunyai arti bahwa tingkat pendapatan bunga dan agunan tetap, maka sumbangan tingkat pendapatan terhadap variasi naik turunnya permintaan kredit sebesar 76,36%..

Sedangkan untuk mengetahui koefisien determinasi secara serentak antara variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat digunakan analisis koefisien determinasi. Dari hasil analisis pada lampiran II dapat diketahui bahwa nilai koefisien determinasi antara variabel-variabel agunan, tingkat bunga dan tingkat pendapatan terhadap variasi naik turunnya permintaan kredit sebesar 99,71% sedangkan sisanya sebanyak 0,29% disebabkan oleh faktor lainnya, yaitu :

- a. Tingkat bunga yang sama untuk kredit dibawah satu tahun disemua BPR yang berada di Kabupaten Jember.
- b. Selera peminjam kredit dianggap sama (karena kebutuhan akan uang tunai segera).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Dari uraian bab sebelumnya, dapat diambil beberapa kesimpulan antara lain :

- a. Berdasarkan hasil analisis Multiple Regresi untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama atau serentak antara agunan, tingkat bunga dan tingkat pendapatan terhadap permintaan kredit diperoleh nilai koefisien determinasi (R^2) = 0,9971 atau 99,71% artinya sumbangan variabel-variabel agunana, tingkat bunga dan tingkat pendapatan terhadap naik turunnya permintaan kredit sebesar 99,71% sedangkan sisanya 0,29% disebabkan oleh faktor lain.
- b. Dari hasil pengujian terhadap koefisien regresi agunan, mempunyai pengaruh positif terhadap permintaan kredit. Hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan bahwa $t \text{ hitung} = 5,903 > t \alpha 0,05 = 1,684$.
- c. Dari hasil pengujian terhadap koefisien regresi ternyata tingkat bunga tidak atau kurang berpengaruh terhadap permintaan kredit. Hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan bahwa $t \text{ hitung} = 0,836 < t \alpha 0,05 = 1,684$.
- d. Berdasarkan dari hasil pengujian terhadap koefisien regresi tingkat pendapatan mempunyai pengaruh positif terhadap permintaan kredit. Hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan bahwa $t \text{ hitung} = 12,189 > t \alpha 0,05 = 1,684$.



DAFTAR PUSTAKA

- Boediono, Ekonomi Moneter, Yogyakarta, BPFE, 1990.
- Faried Wijaya, Untaian Ekonomi Moneter Dan Perbankan, Yogyakarta, BPR, 1984.
- Nopirin, Ekonomi Moneter, Yogyakarta, BPFE, 1986.
- Pandu Suharto, Peran Masalah Dan Prospek BPR, Jakarta, LPPI, 1991.
- Pandu Suharto, Sejarah Pendirian BPR, Jakarta, LPPI, 1988.
- Sadono Sukirno, Ekonomi Pembangunan Proses, Masalah Dan Dasar Kebijakan, Jakarta, LPFE-UI, 1985.
- Slamet Hadisuewito, Manajemen Perbankan, Yogyakarta, BPFE, 1987.
- Soetatwo Hadiwigeno, Lembaga-Lembaga Keuangan Dan Bank, Yogyakarta, BPFE, 1982.
- Sudarsono, Ekonomi Moneter, Yogyakarta, BPFE, 1982.
- Supranto J, Ekonometrika Buku Satu, Jakarta, BPFE-UI, 1985.
- Teguh Pudjo Mulyono, Menejemen Perkreditan Bagi Bank Komersial, Yogyakarta, BPFE, 1986.

Lampiran II

PERHITUNGAN ANALISIS REGRESI

----- REGRESSION ANALYSIS -----

HEADER DATA FOR : SUDARMONO

LABEL : FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERMINTAAN KREDIT

NUMBER OF CASES : 50 NUMBER OF VARIABLES : 4

		DATA KREDIT	
INDEX	NAME	MEAN	STD.DEV
1	X1	311120.0000	222598.4433
2	X2	.1474	.0190
3	X3	497500.0000	367479.3483
DEP.VAR	Y	188900.0000	140088.4924

DEPENDENT VARIABLE : Y

VAR.	REG. COEFICIENT	STD.ERROR	T (DF=46)	PROB.	PARTIAL r ²
X1	.1902	.0373	5.093	.00001	.3606
X2	-84850.5964	101450.5038	-.836	.40727	.0150
X3	.2690	.0221	12.189	.00000	.7636
CONSTAN	8447.0560				

STD. ERROR OF EST = 11067.4529

ADJUSTED R SQUARED = .9938

R SQUARED = .9941

MULTIPLE R = .9971

ANALYSIS OF VARIAN TABLE

SOURCE	SUM OF SQUARES	D.F	MEAN SQUARE	F. RATIO	PROB
REGRESSION	955980028392.3200	3	318660009464.1100	2601.550	8.000E-14
RESIDUAL	5634471607.6921	46	122488513.2107		
TOTAL	961614500000.0100	49			

Lampiran III

----- CORRELATION MATRIK -----

HEADER DATA FOR : C : SUDARMONO

LABEL : FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERMINTAAN KREDIT

NUMBER OF CASSE : 50 NUMBER OF VARIABLES : 4

CORELASI MATRIK

	Y	X ₁	X ₂	X ₃
Y	1.00000			
X ₁	.98720	1.00000		
X ₂	.57681	.60252	1.00000	
X ₃	.99483	.98055	.57871	1.00000

CRITIKAL VALUE (1-TAIL, .05) = + Or - .23543

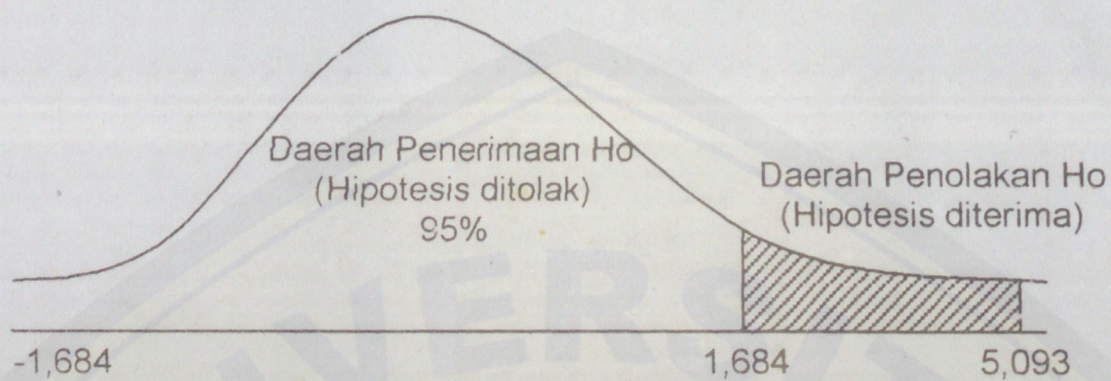
CRITICAL VALUE (2 - tail, .05) = +/- .27841

N = 50

45

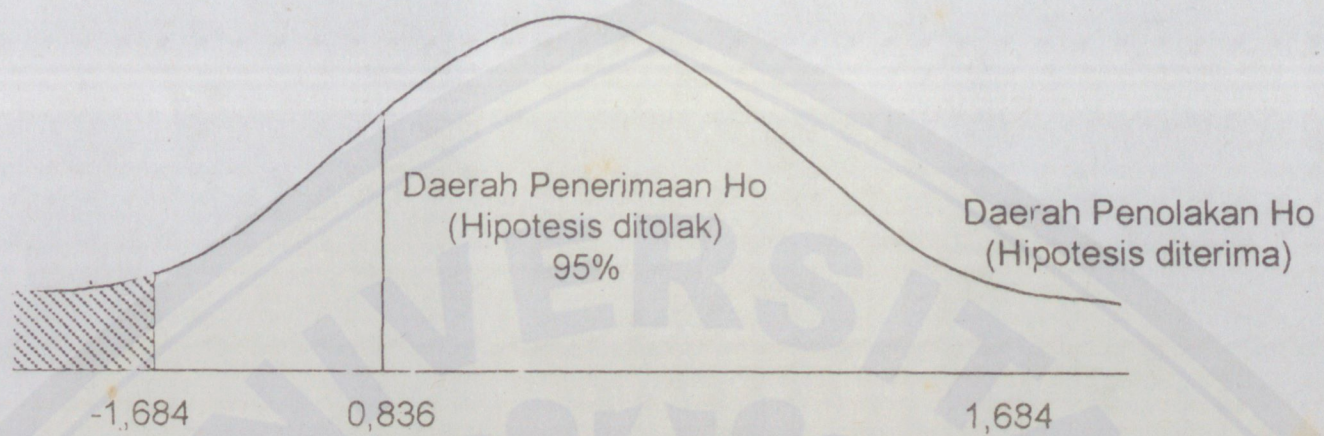
Lampiran IV

Kriteria Pengujian Agunan dengan Menggunakan Uji Signifikan Dua Arah
t-test Memakai Level of Signifikan 95%



Lampiran V

Kriteria Pengujian Tingkat Bunga dengan Menggunakan Uji Signifikan Dua Arah t-test Memakai Level of Signifikan 95%



Lampiran VI

Kriteria Pengujian Tingkat Pendapatan dengan Menggunakan Uji Signifikan Dua Arah t-test Memakai Level of Signifikan 95%

